

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara, sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Karenanya penyelenggara pendidikan baik sekolah maupun pemerintah bertanggung jawab menyediakan pendidikan secara optimal demi terwujudnya tujuan Negara Republik Indonesia tersebut. Pemerintah tentunya berperan dalam penentuan sasaran serta program dan strategi yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan nasional. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomisasi Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah bebas mengatur daerahnya sendiri-sendiri selama masih dalam koridor yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam era otonomisasi daerah, pemerintah daerah bukan saja diberikan kebebasan dalam mengurus bidang pemerintahan, akan tetapi pemerintah juga mengurus dan mengatur tentang kemajuan dan perkembangan pendidikan. Kebebasan pemerintah daerah ini menyebabkan kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pemerintah Pusat secara administrasi telah menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan pendidikan di daerahnya. Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnansi dalam menuju

pemberdayaan masyarakat yang berpendidikan dan besar kemungkinan daerah tersebut tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang.

Salah satu pemerintah daerah yang serius dalam meningkatkan pendidikan yaitu dinas pendidikan Kota Tangerang, seperti yang disampaikan oleh Walikota Tangerang bahwa selama ini Pemerintah Kota Tangerang telah dan akan terus berupaya memberikan yang terbaik. Diantaranya melalui beasiswa yang diberikan kepada pelajar berprestasi sekolah negeri khususnya bagi yang kurang mampu, yaitu melalui Program Tangerang Cerdas (tangerangkota.go.id, 2016). Sebagai langkah awal dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan di Kota Tangerang, Dinas Pendidikan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Pendidikan Kota Tangerang. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang yang telah mengakomodir Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta semakin berkembangnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dan undang undang mengenai sistem perencanaan, maka visi dan misi setiap SKPD harus disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah daerahnya, sehingga dengan sendirinya ketercapaian visi dan misi dari SKPD tertentu merupakan salah satu gambaran ketercapaian dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu misi yang dicanangkan oleh dinas pendidikan Kota Tangerang yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dianggap penting dalam memajukan pendidikan karena kompetensi guru dianggap memikul tanggung jawab utama dalam transformasi orientasi peserta didik dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari

ketergantungan menjadi mandiri, dari tidak terampil menjadi terampil, dengan metode-metode pembelajaran yang bukan lagi mempersiapkan peserta didik yang pasif, melainkan peserta didik berpengetahuan yang senantiasa mampu menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru dengan berpikir, bertanya, menggali, mencipta, dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupannya. Dalam peraturan pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang badan standar nasional pendidikan (BSNP) ditegaskan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran menunjukkan bahwa guru merupakan pihak pertama yang paling bertanggung jawab dalam pentransferan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Terkait pernyataan tersebut Mulyasa (2007) mengatakan bahwa betapapun bagusnya suatu kurikulum (*official*), tetapi hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan juga siswa dalam kelas (*actual*).

Di Kota Tangerang sendiri seperti dilansir dari laman bkpsdm.tangerangkota.go.id dalam artikel berjudul “Pelatihan Penguatan Materi Ajar Dan Penguatan Kompetensi Pedagogik Bagi Guru SD” disebutkan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang masih ditemui guru yang memiliki kompetensi kurang maksimal dalam hal penguasaan materi ajar. Masih belum banyak terdapat guru yang mengupayakan pendalaman dan pengembangan materi ajar yang diampunya. Selain itu terdapat kecenderungan guru SD yang masih menggunakan metode pembelajaran konvensional (ceramah dan tanya jawab) dan belum variatif dalam penggunaan metode pembelajaran. Dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 diketahui bahwa di Kota Tangerang sampai dengan Tahun 2018 masih terdapat 1.843 orang atau 12,14% guru SD/MI dan SMP/MTs dari sejumlah guru yang ada di Kota Tangerang sebanyak 15.182 orang belum berkualifikasi S1, tentunya kondisi ini akan berdampak terhadap kompetensi guru tersebut dalam mengajar. Berdasarkan beberapa pemaparan permasalahan diatas diketahui bahwa kompetensi profesional dan pedagogik menjadi fokus utama yang diperlukan dalam meningkatkan mutu kompetensi pendidik. Untuk itu Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas

BKPSDM Kota Tangerang berupaya untuk terus melakukan peningkatan mutu kompetensi pendidik di Kota Tangerang. Salah satu bukti upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kompetensi guru yaitu melalui *BKPSDM Kota Tangerang yang bekerjasama dengan PPPPTK Penjas dan BK Kemendikbud serta Asosiasi Dosen Indonesia* berupaya melaksanakan Pelatihan Strategi Perencanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 bagi guru SD dan Pelatihan Penguatan Model Pembelajaran *Project Based Learning* bagi guru SMP di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dengan tujuan agar guru Sekolah Dasar mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan memenuhi unsur pembelajaran abad 21, literasi, penguatan pendidikan karakter dan HOTS dapat terpenuhi dan siswa mempelajari dengan sempurna (BKPSDM, 2019).

Selanjutnya diperlukan adanya *continuous improvement* terhadap kompetensi pedagogik pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang, yaitu perlu adanya proses perbaikan, perencanaan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara konsisten dan berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Salah satu metode perencanaan peningkatan mutu yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut adalah dengan penerapan metode *Quality Function Deployment (QFD)*. Metode *Quality Function Deployment (QFD)* menjadi salah satu metode terstruktur untuk menentukan *Voice of the Customer (VOC)* serta merancang dan mengembangkan suatu produk baru untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen (Jaiswal, 2012). Metode ini mengidentifikasi *Voice of Customers (VOC)* yang digunakan sebagai input utama dalam penyusunan *House of Quality (HOQ)*. Penerapan Metode QFD pada dinas BKPSDM Kota Tangerang diharapkan akan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program-program dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan karakteristik mutu yang akan menjadi acuan bagi seluruh proses peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas BKPSDM Kota Tangerang.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu rendahnya tingkat kompetensi pedagogik dan profesional pendidik dan kompetensi tenaga kependidikan di Kota Tangerang. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas BKPSDM Kota Tangerang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional pendidik dan kompetensi tenaga kependidikan di Kota Tangerang melalui berbagai pelatihan serta rencana peningkatan mutu program peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional pendidik dan kompetensi tenaga kependidikan di Kota Tangerang melalui metode *Quality Function Deployment*.

C. RUMUSAN MASALAH DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan metode *Quality Function Deployment* (QFD) dalam upaya peningkatan kompetensi guru oleh dinas pendidikan Kota Tangerang?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka agar dapat menjawab masalah tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang didasarkan oleh pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja atribut yang diinginkan guru dan tenaga kependidikan dalam program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang?
2. Apa saja prioritas pengembangan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang berdasarkan atribut yang diharapkan oleh guru dan tenaga kependidikan?
3. Apa saja rekomendasi rencana peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang diperoleh melalui penerapan metode *Quality Function Deployment* (QFD)?
4. Bagaimana analisis penerapan metode *Quality Function Deployment* (QFD) dalam upaya peningkatan kompetensi guru oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menerapkan metode QFD untuk mengetahui atribut yang diinginkan guru dan tenaga kependidikan dalam program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang.
2. Menerapkan metode QFD untuk menentukan prioritas pengembangan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang berdasarkan atribut yang diharapkan oleh guru dan tenaga kependidikan.
3. Menerapkan metode QFD untuk menganalisis dan memperoleh rekomendasi dalam rencana peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang.
4. Menganalisis penerapan metode Quality Function Deployment (QFD) dalam upaya peningkatan kompetensi guru oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini yaitu dengan menerapkan metode *Quality Function Deployment (QFD)* terhadap program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang maka akan dapat tersusun atribut keinginan pendidik dan tenaga kependidikan dan prioritas pengembangan yang diharapkan akan dapat meningkatkan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang. Adapun manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis.

1. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Dinas BKPSDM Kota Tangerang

- Memberikan sumbangan pemikiran mengenai program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan oleh dinas BKPSDM Kota Tangerang yang berorientasi pada keinginan pendidik dan tenaga pendidik.

2. Manfaat Teoritis

- Menambah disiplin keilmuan tentang teori pendidikan yang berkaitan dengan metode *Quality Function Deployment (QFD)*.
- Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.

F. STRUKTUR ORGANISASI TESIS

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas lima bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Bab dua yaitu kajian pustaka. Bab ini berisikan pemaparan terkait dengan landasan teoritis berdasarkan masalah yang diangkat oleh peneliti serta memiliki relevansi dengan topik pembahasan.

Bab tiga adalah metode penelitian. Bab ini memuat metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari desain penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

Bab empat yaitu hasil dan pembahasan. Bab ini memuat hasil atau temuan yang diperoleh peneliti dari lapangan, yang selanjutnya digambarkan secara sistematis berdasarkan analisis data yang dilakukan.

Bab lima adalah kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Bab terakhir ini memuat kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta memberikan masukan atau rekomendasi dan implikasi penelitian